



**Laporan Kinerja Triwulan 2  
Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat selama triwulan 2 tahun 2025.

**A. Progress Capaian Kinerja**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
<b>[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan</b>				
[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1,31	Persen	0,09	0,16
<b>[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat</b>				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Sangat Baik	Predikat	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	A	Predikat	-	-

**B. Analisis Hasil Capaian Kinerja**

**[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan**

**[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran**

**Progress/Kegiatan**

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan 2 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Daring
2. Pelatihan Tatap Muka bagi Guru untuk Berpikir Komputasi dan Coding Minecraft Education
3. Verifikasi dan Validasi Dokumen Pendaftaran UKKJ JF Guru dan Pengawas Sekolah tahun 2025
4. Verval Dokumen Perbaikan Pendaftaran UKKJ dan Rapat Koordinasi Penentuan TUK UKKJ
5. Verifikasi dan Validasi Berkas Seleksi Administrasi Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Tertentu Tahun 2025
6. Pemantauan UKKJ JF Guru tahun 2025



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

7. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Bagi JF Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik
8. Rangkaian kegiatan Hardiknas/Semarak Hardiknas
9. Rapat Koordinasi BBGTK Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan KCD (Sosialisasi Program Prioritas)
10. Rapat Koordinasi Program PM dan KKA (Pendataan, Pembiayaan)
11. TOT Narasumber Pelatihan PM
12. TOT Calon Fasilitator Pelatihan PM.

#### **Kendala/Permasalahan**

Kendala dan Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen UKKJ yang cukup banyak dengan target waktu terbatas menyebabkan perlu personil yang cukup banyak untuk memverifikasi dan memvalidasi dokumen sehingga memerlukan anggaran yang lebih besar
2. Pendataan Program Pembelajaran Mendalam (PM) cukup dinamis, mengakibatkan penentuan/penetapan data peserta sulit difinalkan.
3. Rincian anggaran biaya (RAB) program Pembelajaran Mendalam (PM) sulit ditetapkan karena adanya perubahan data peserta, skema kegiatan dan jadwal pelaksanaan.

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

Strategi dan tindak lanjut yang dilakukan BBGTK Jawa Barat adalah dengan:

1. Menambah personil BBGTK Jawa Barat dan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan Verval Dokumen UKKJ serta melakukan revisi anggaran
2. Melakukan tindak lanjut pendataan dengan koordinasi terus menerus dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan dan menetapkan data peserta.
3. Melakukan koordinasi terus menerus dengan Dinas Pendidikan dalam menyusun dan menyepakati RAB yang akan ditetapkan.

#### **[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat**

**[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik**

#### **Progress/Kegiatan**

1. Pada triwulan 2, kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:
2. Melakukan rapat internal terkait persiapan kegiatan yang melibatkan ketua tim keuangan dengan staf keuangan dan perencanaan; Melakukan pelaporan data kontrak secara tepat waktu;
3. Melakukan pengelolaan Uang Persediaan minimal 1 kali per bulan;
4. Melakukan pengelolaan Uang Tambahan Persediaan (TUP) dan mempertanggungjawabkan secara tepat waktu;
5. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Wilayah Prov. Jawa Barat dan KPPN Bandung I terkait pelaksanaan anggaran Tahun 2025;
6. Menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara secara tepat waktu



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

setiap bulan/ tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya;

7. Melakukan rapat internal Bagian Keuangan terkait pembahasan strategi penarikan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### **Kendala/Permasalahan**

Kendala dan permasalahan yang terjadi

1. Jadwal kegiatan program prioritas yang pelaksanaannya menunggu arahan dan kebijakan pusat sehingga berimbas pada rencana deviasi halaman III DIPA;
2. Masih terdapat pagu anggaran yang di blokir sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran;
3. Pengelolaan anggaran PNBFP Fungsional belum dapat dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih dalam proses pembahasan, penyepakatan kerjasama dan penerbitan rekening penampungan lainnya.

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melakukan koordinasi dengan pusat terkait pelaksanaan kegiatan prioritas
2. Melakukan rapat internal terkait strategi penyerapan anggaran.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan bank persepsi yang ditunjuk.

**[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat**

**[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A**

#### **Progress/Kegiatan**

1. Rapat Internal
  - Rapat Koordinasi Persiapan Program Anggaran 2025
  - Rapat Koordinasi Koordinasi Pencapaian Kinerja Triwulan I dengan stakeholder
  - Rapat Pemantauan Kinerja SMT 1 dan Perencanaan Pembiayaan PM dan KKA
2. Diklat Penyegaran PP-SPM dan Diklat Teknis bendahara Pengeluaran
3. Peningkatan Kapasitas SDM di PPSDM Kemendikdasmen
  - Diklat Manajemen Risiko
  - Diklat SPBE
  - Diklat Kearsipan
  - Diklat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Diperlukan beberapa penyesuaian terhadap komponen kegiatan yang ada di RKA-KL (tahapan kegiatan, satuan biaya);
2. Banyaknya usulan kegiatan yang diajukan oleh Tim Kerja dan tidak semua usulan dari masing-masing Tim Kerja dapat diakomodir;
3. Penjadwalan yang disusun belum konsisten dilaksanakan tepat waktu;
4. Rencana Penarikan Dana yang tidak sesuai.

#### **Strategi/Tindak Lanjut**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

1. Melakukan revisi RKA-KL (POK, DIPA);
2. Melakukan reuiu terhadap usulan kegiatan sesuai dengan arahan pimpinan (dukungan program prioritas, kebijakan lembaga);
3. Melakukan konfirmasi dan memastikan pada Tim Kerja/Penanggung Jawab agar kegiatan dilakukan sesuai jadwal;
4. Melakukan revisi penyesuaian/pemutakhiran Rencana Penarikan Dana.

### C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7614.DCI.003] Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	130	300	Rp17.860.428.000	Rp2.916.414.027	16.33
2	[DI.7614.QDC.011] Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	250	500	Rp14.313.621.000	Rp9.009.827.969	62.95
3	[DI.7614.SCI.010] Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	0	0	Rp51.939.959.000	Rp0	0.00
4	[DI.7614.SCI.011] Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	0	0	Rp7.338.761.000	Rp0	0.00
5	[WA.7619.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp20.000.000	Rp0	0.00
6	[WA.7619.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp97.696.000	Rp85.530.810	87.55
7	[WA.7619.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp47.460.586.000	Rp25.578.087.313	53.89
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp139.031.051.000</b>	<b>Rp37.589.860.119</b>	<b>27.04</b>

### D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan reuiu program dan penyesuaian terhadap komponen kegiatan dalam anggaran/RKA-KL dengan merevisi POK



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Agar dilakukan review anggaran secara berkala untuk memastikan setiap program/kegiatan yang diusulkan mendukung dan selaras dengan kebijakan
3. Agar dilakukan monitoring anggaran sehingga terpantau adanya deviasi antara penyerapan dan rencana penarikan dana
4. Memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan penjadwalan yang sudah disepakati bersama
5. Meningkatkan koordinasi dengan pusat atau pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program-prioritas agar kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

Bandung, 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa  
Barat

Mohamad Hartono, S.H., M.Ed



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE